



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RINA P. SOEMARNO**  
Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MOH. MAHFUD MD**  
Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2023 berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan ataupun sanksi.

PIHAK KEDUA,

  
**MOH. MAHFUD MD**

Jakarta, Januari 2023  
PIHAK PERTAMA,



**RINA P. SOEMARNO**

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**

Unit Organisasi Eselon I: Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri  
Tahun Anggaran : 2023

<b>Sasaran Strategis (1)</b>	<b>Indikator Kinerja (2)</b>	<b>Target (3)</b>
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	100%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	a. Nilai SAKIP	BB
	b. Nilai PMPRB	31
	c. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4

Jumlah Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Politik Luar Negeri adalah sebesar Rp13.332.340.000,- (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

**Menteri Koordinator  
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  
Republik Indonesia**

  
**MOH. MAHFUD MD**

**Deputi Bidang Koordinasi  
Politik Luar Negeri**



**RINA P. SOEMARNO**

**DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI**

<b>Sasaran Strategis 1</b>	<b>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif</b>
<b>Indikator Kinerja 1</b>	<b>Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional</b>
Definisi	<p>Mengukur sejauh mana capaian target pembangunan bidang politik luar negeri pada K/L di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri sesuai dengan Dokumen Perencanaan Nasional. Target pembangunan bidang politik luar negeri pada K/L yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri (Target 2023=91);</li> <li>b. Indeks Citra Positif Indonesia di mata dunia internasional (Target 2023=3,95);</li> <li>c. Persentase Forum Internasional yang Dipimpin Menko Polhukam pada Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral (Target 2023=75%).</li> </ul>
Sumber Data	<p>Capaian target pembangunan bidang politik luar negeri pada K/L yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri;</li> <li>b. Indeks Citra Positif Indonesia di mata dunia internasional;</li> <li>c. Persentase Forum Internasional yang Dipimpin Menko Polhukam pada Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral.</li> </ul>
Cara Menghitung	<p>Capaian = <math>\frac{A + B + C}{3}</math></p> <p>A = <math>\frac{\text{Capaian Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri Tahun 2023}}{91} \times 100\%</math></p> <p>B = <math>\frac{\text{Capaian Indeks Citra Positif Indonesia di mata dunia internasional Tahun 2023}}{3,95} \times 100\%</math></p> <p>C = <math>\frac{\text{Forum Internasional yang Dipimpin Menko Polhukam pada Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral}}{9 \text{ Rencana Forum Internasional yang Dipimpin Menko Polhukam pada Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral tahun 2023}} \times 100\%</math></p>

<b>Indikator Kinerja 2</b>	<b>Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional</b>
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung terhadap pembangunan bidang Politik Luar Negeri yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Nasional. Isu Dokumen Perencanaan Nasional yang akan didukung pada rekomendasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri pada Sub IKU-1 (Penyelesaian Kasus WNI di luar negeri) dan Sub IKU-4 (Diplomasi Perlindungan WNI di luar negeri);</li> <li>b. Indeks Citra Positif Indonesia di mata dunia internasional pada dimensi <i>governance and rule of law</i>;</li> <li>c. Jumlah Forum yang Dipimpin Indonesia pada Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral dalam mendukung keketuaan ASEAN pada tahun 2023, dalam mendukung Optimalisasi Kontribusi Indonesia pada sidang PBB dan dalam mendukung proses akses Indonesia untuk dapat diterima sebagai full member pada Financial Action Task Force (FATF).</li> </ul>
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan pada unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yang mendukung Dokumen Perencanaan Nasional.
Cara Menghitung	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri}}{\text{Jumlah capaian rekomendasi kebijakan pada unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri}} \times 100\%$
<b>Indikator Kinerja 3</b>	<b>Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti</b>
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang Politik Luar Negeri yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan <i>follow up</i> atas rekomendasi yang dihasilkan serta memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan pada unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Cara Menghitung	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan pada unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yg ditindaklanjuti K/L terkait}}{\text{Jumlah capaian rekomendasi kebijakan pada unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri}} \times 100\%$

<b>Sasaran Strategis 2</b>	<b>Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal</b>
<b>Indikator Kinerja 1</b>	<b>Nilai SAKIP</b>
Definisi	Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian rekomendasi untuk peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi kerja pemerintah.
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar negeri yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kategori hasil penilaian : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AA (90-100)</li> <li>2. A (80-90)</li> <li>3. BB (70-80)</li> <li>4. B (61-70)</li> <li>5. CC (51-60)</li> <li>6. C (31-50)</li> <li>7. D (0-30)</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja 2</b>	<b>Nilai PMPRB</b>
Definisi	Nilai PMPRB adalah nilai yang diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja Deputi Bidkoo Pollugri melalui aplikasi pmprb.menpan.go.id atas upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai <i>good governance</i> .
Sumber Data	Laporan penilaian mandiri melalui aplikasi pmprb.menpan.go.id yang dilakukan bersama oleh unit kerja Deputi Bidkoo Pollugri dengan Inspektorat Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	Laporan penilaian mandiri pada setiap program dalam komponen pengungkit (proses), yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Perubahan</li> <li>2. Penataan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>3. Penataan dan Penguatan Organisasi</li> <li>4. Penataan Tatalaksana</li> <li>5. Penguatan Pengawasan</li> <li>6. Penataan Sistem Manajemen SDM</li> <li>7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja</li> <li>8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</li> </ol>

Indikator Kinerja 3	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy
Definisi	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy Bidkooor Pollugri merupakan penilaian yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan tamu atau konsumen atas pelayanan sekretariat. Tingkat kepuasan diperoleh dengan membandingkan pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diharapkan.
Sumber Data	Laporan hasil survey Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
Cara Menghitung	Laporan hasil survey Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri kepada <i>stakeholder</i> Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, baik internal Kemenko Polhukam maupun external Kemenko Polhukam. Nilai yang diambil adalah nilai yang paling sering muncul ( <i>modus</i> ) pada hasil perhitungan survei.

Jakarta, Januari 2023  
Deputy Bidang Koordinasi  
Politik Luar Negeri



Rina P. Soemarno